

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENGUATAN KADER PEREMPUAN DALAM PERCEPATAN
PENCAPAIAN SDGs DI DESA SUAK LAMPUNG SELATAN**

TIM PENGUSUL

Ketua	: Selvi Diana Meilinda, M.P.A.	NIDN: 0218058701	SintaID: 6680567
Anggota	: Anisa Utami, M.A.	NIDN: 0022089301	SintaID: 6682987
	: Ita Prihantika, MA.	NIDN: 0230068401	SintaID: 6041851
	: Syamsul Ma'arif, M.Si.	NIDN: 0010127210	SintaID: 6680671

**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian : Penguatan Peran Kader Perempuan Dalam Percepatan
Pencapaian SDGs di Desa Suak Lampung Selatan

Manfaat sosial ekonomi : Mendukung Program Peningkatan Sumber Daya Manusia

Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Sosial

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Selvi Diana Meilinda

b. NIDN : 0218058701

c. SINTA ID : 6680567

d. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar

e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

f. Nomor HP : 085669727341

g. Alamat surel (e-mail) : selvi.meilinda@fisip.unila.ac.id

Anggota Pengabdian (1)

a. Nama Lengkap : Anisa Utami, S.IP., MA.

b. NIDN : 0022089301

c. SINTA ID : 6682987

d. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Anggota Pengabdian (2)

a. Nama Lengkap : Ita Pribantika, MA.

b. NIDN : 0230068401

c. SINTA ID : 6041851

d. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Anggota Pengabdian (3)

a. Nama Lengkap : Syamsul Ma'arif, M.Si.

b. NIDN : 0010127210

c. SINTA ID : 6680671

d. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Lokasi Pengabdian : Desa Suak, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan

Luaran : Artikel Ilmiah Jurnal Pengabdian terbit 2021

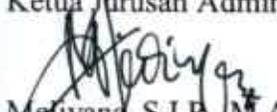
Lama Pengabdian : 6 (enam) Bulan

Biaya Pengabdian : Rp 12.500.000,- (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*)

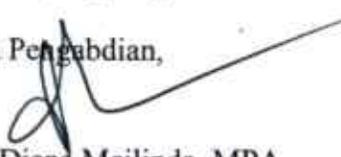
Sumber dana : DIPA FISIP Tahun Anggaran 2021

Bandar Lampung, September 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik,


Meliyana, S.I.P., M.A.
NIP. 197405202001122002

Ketua Pengabdian,


Selvi Diana Meilinda, MPA.
NIK.231504870518201

Menyetujui,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama,


Dr. Dedy Hermawan, M.Si
NIP.197507202003121002

Judul: Penguatan Peran Kader Perempuan Dalam Percepatan Pencapaian SDGs Di Desa Suak Lampung Selatan

ABSTRAK

Kegiatan ini akan mengaplikasikan metode *blended learning* dalam mendorong peran perempuan untuk mempercepat pencapaian tujuan SDGs desa. SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah: meningkatkan peran kader perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan desa Suak, meningkatkan akses kader perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi di Desa Suak, dan meningkatkan kapasitas dan produktifitas kader perempuan dalam mewujudkan tercapainya tujuan SDGs di Desa Suak. Diharapkan, kegiatan ini dapat memaksimalkan peran kader perempuan desa melalui beberapa langkah tahapan kegiatan, yaitu pertama, fase persiapan bahan-bahan dasar dan mempelajari masalah perempuan Desa Suak dalam pembangunan. Fase ini dilakukan dengan mempelajari berbagai materi yang nantinya akan disiapkan. Kedua, fase tatap muka untuk bertemu dengan para fasilitator, kader perempuan dan narasumber. Kegiatan tatap muka ini akan dilakukan secara terpisah antar kelompok stakeholders dengan memperhatikan protocol kesehatan. Ketiga, fase pasca tatap muka dengan diskusi pasca pertemuan dengan kader perempuan desa. Pengembangan berikutnya adalah diskusi daring untuk pengembangan kapasitas. Luaran pengabdian ini ditargetkan dapat menghasilkan satu artikel terindeks yang siap untuk disubmit ke jurnal Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (terindeks sinta 4) tahun 2021. Disamping itu, pengabdian ini juga dipersiapkan untuk dapat menghasilkan satu artikel yang siap untuk dipresentasikan pada pertemuan ilmiah LPPM Universitas Lampung.

Kata Kunci: Peran Kader Perempuan Desa, SDGs Desa, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

This activity will apply blended learning methods in encouraging the role of women to accelerate the achievement of village SDGs. The Village SDGs are an integrated effort to realize a village without poverty and hunger, an economic village that grows evenly, a village that cares about health, a village that cares about the environment, a village that cares about education, a women-friendly village, a networked village, and a culturally responsive village to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals. The objectives of this activity are: increasing the role of women cadres in decision making related to the development of the Suak village, increasing the access of women cadres to participate in the management of economic resources in Suak Village, and increasing the capacity and productivity of women cadres in realizing the achievement of the SDGs goals in the village. It is hoped that this activity can maximize the role of village women cadres through several stages of activity, namely the first phase of preparing basic materials and studying the problems of women in Suak Village in development. This phase is done by studying various materials that will be prepared later. Second, the face-to-face phase to meet with facilitators, female cadres and resource persons. This face-to-face activity will be carried out separately between stakeholder groups by taking into account the health protocol. Third, the post-face-to-face phase with post-meeting discussions with village women cadres. The next development is an online discussion for capacity building. The output of this service is targeted to produce an indexed article that is ready to be submitted to the journal Martabe: Journal of Community Service. Muhammadiyah University of South Tapanuli (indexed by sinta 4) in 2021. In addition, this service is also prepared to produce an article that is ready to be presented at the LPPM scientific meeting of the University of Lampung.

Keywords: Role of Village Women Cadre, Village SDGs, Sustainable Development.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1. Analisis Situasi	1
I.2. Permasalahan Mitra	3
I.3. Tujuan Kegiatan	3
I.4. Manfaat Kegiatan	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
II.1. Sustainabel Development Goals (SDGs)	4
II.2. Pembangunan Desa	4
II.3. Pemberdayaan Perempuan	5
BAB III	7
MATERI DAN METODE	7
III.1. Realisasi Pemecahan Masalah	7
III.2. Sasaran	8
III.3. Metode Kegiatan	8
III.4. Keterkaitan	9
BAB IV	10
HASIL DAN PEMBAHASAN	10
IV.1. Realisasi Kegiatan	10
IV.2. Hasil Pengolahan Data Pengabdian	11
IV.3. Pembahasan	14
BAB V	15
KESIMPULAN DAN SARAN	15
V.1. Kesimpulan	15
V.2. Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Analisis Situasi

Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dibentuk pada tahun 1971 yang kemudian mengalami pemekaran menjadi dua desa yaitu Desa Suak dan Desa Siring Jaha. Secara administratif, Desa Suak merupakan bagian dari Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas wilayahnya meliputi: (1) sebelah utara berbatasan dengan Desa Banjar Suri dan Desa Banjar Saha; (2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Siring Jaha dan kawasan perkebunan milik PTPN; (3) Sebelah selatan berbatasan dengan laut Teluk Lampung; (4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung.

Dari sisi geografis, Desa Suak memiliki wilayah seluas 1900 hektar yang terdiri dari 50 hektar lahan padi sawah, 185 hektar lahan padi ladang, 156 hektar ladang jagung, 37 hektar lahan palawija, 11 hektar lahan kakao, 35 hektar perkebunan sawit, 13 hektar perkebunan pisang, 688 hektar kebun kelapa dalam, 17 hektar kebun singkong, 9 hektar kebun karet, 850 hektar lain-lain. Berdasarkan data kependudukan tahun 2021, Desa Suak memiliki penduduk berjumlah 4516 jiwa yang terdiri laki-laki 2342 dan perempuan 2174. Besarnya penggunaan lahan yang didominasi lahan pertanian ini ternyata berbanding lurus dengan jenis pekerjaan penduduknya di mana mayoritas penduduk Desa Suak berprofesi sebagai petani. Hal ini mendorong Desa Suak berkembang menjadi kawasan agraris.

Pembangunan di Desa Suak saat ini mengacu pada implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Seluruh belanja dana desa wajib digunakan untuk menjalankan SDGs Desa. *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa adalah bentuk pembangunan total atas desa, sehingga upaya pencapaian SDGs desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 menjadi tidak mudah, karena itulah, penggunaan dana desa tahun 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Salah satu kegiatan pendukung pencapaian SDGs desa adalah keterlibatan perempuan desa.

Perempuan menghadapi tekanan ganda dalam reaksi persoalan pembangunan desa. Pertama, menghadapi tekanan dari pihak luar yang sebagian besar telah

mengambil alih SDA yang merupakan sistem penghidupan mereka. Kedua, dalam budaya kehidupan komunitas yang patriarki, perempuan juga dihadapkan dengan ketidakadilan internal yang sudah tercipta sebelum para pihak luar (privat dan pemerintah) datang menguasai SDA mereka. Situasi yang tidak adil ini direspon oleh kaum perempuan dengan bekerja dan bekerja. Ada tidak adanya uang, perempuan harus memastikan keberlangsungan pangan keluarga. Situasi ini membuat sebagian besar perempuan yang hidup di dalam dan sekitar SDA tidak memikirkan kondisi kesehatan mereka sendiri. Sementara itu generasi muda perempuan melakukan hal yang sama seperti para laki-laki. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik, pembantu rumah tangga di kota-kota atau menjadi buruh migran ke luar negeri. Namun, upaya yang dilakukan kaum perempuan belum dinilai sebagai bagian dari kontribusi yang strategis untuk dihargai dalam banyak aspek. Perempuan masih dianggap kurang atau bahkan tidak berkontribusi dalam proses pembangunan. Pekerjaan domestik perempuan tidak pernah dianggap sebagai jasa yang bernilai. Keadaan ini berjalan tanpa protes karena dianggap sebagai kewajiban bahkan sebagai kodrat. Secara sadar atau tidak sadar, perempuan yang bekerja mengurus keluarga dilihat sebagai orang yang tidak bekerja dan dilegalisasikan dalam kelompok bukan angkatan kerja.

Eksistensi kader perempuan desa memiliki peran penting baik pada ranah domestik (keluarga) dan publik (masyarakat). Dalam perannya mengelola keuangan keluarga baik dari hasil nafkah suami maupun kerja produktifnya menjadikan kader perempuan desa sadar akan posisinya menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Mereka mampu mendayagunakan sumber ekonomi melalui pemanfaatan stok modal sosial yang dimilikinya berupa jejaring sosial dalam lingkungan sosial untuk mempertahankan bahkan meningkatkan ekonomi keluarga (Puspitasari: 2015). Perekonomian yang sangat rendah juga didukung oleh tidak adanya peran Ibu Rumah Tangga yang ada di Desa Suak yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan keluarga. Peran kader perempuan di sektor ekonomi belum optimal karena beberapa hal, seperti beban kerja rumah tangga yang berat dan upah kerja yang lebih rendah dari laki-laki. Padahal, peran perempuan pekerja bisa membantu pemulihan ekonomi keluarga. Terlebih pada saat ini pendapatan keluarga menurun secara signifikan akibat adanya pandemi Covid-19.

I.2. Permasalahan Mitra

Mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kader perempuan Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Ada beberapa kondisi situasi yang dialami oleh mitra yaitu:

1. Rendahnya keterlibatan kader perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan desa;
2. Kurangnya akses kader perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi di Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
3. Rendahnya kapasitas dan peran kader perempuan Desa Suak dalam pengelolaan Sumberdaya Alam yang dimiliki untuk percepatan pendapaian SDGs desa.

I.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Meningkatkan keterlibatan kader perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan desa;
2. Meningkatkan akses kader perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi di Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
3. Meningkatkan kapasitas dan peran kader perempuan dalam pengelolaan Sumberdaya yang dimiliki untuk percepatan pencapaian SDGs desa.

I.4. Manfaat Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai:

1. Meningkatkan keterlibatan kader perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan desa;
2. Meningkatkan akses kader perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi di Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
3. Meningkatkan kapasitas dan peran kader perempuan dalam pengelolaan Sumberdaya yang dimiliki untuk percepatan pencapaian SDGs desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan hadir dalam rangka mengakomodir segala perubahan yang terjadi setelah berakhirnya era pembangunan millennium serta memasukkan beberapa tujuan baru (Setianingtias et al., 2019). Ada empat dimensi dalam SDGs, yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan dan dimensi kelembagaan. Empat dimensi ini kemudian dijabarkan kedalam 17 tujuan dan 169 target SDGs. Menurut Alisjahbana dan Murniningtyas (Setianingtias et al., 2019) cakupan SDGs yang luas justru menjadi kelemahan, kurangnya sinergi dalam upaya pencapaian masing-masing tujuan. Pembangunan berkelanjutan perlu dipahami lebih komprehensif dengan melihat bagaimana hubungan dan interaksi antara indikator dalam masing-masing dimensi maupun hubungan antar dimensi (Pradhan et al., 2017).

Keberlangsungan upaya perwujudan SDGs bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat melalui nilai-nilai kemasyarakatan yang mendorong sikap dan perilaku menuju pembangunan berkelanjutan. Proses globalisasi yang diperkuat oleh perubahan sosial ekonomi dan sosial budaya telah memberikan pengaruh yang kuat pada sistem nilai, gaya hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Sehingga upaya menjaga keberlanjutan nilai-nilai masyarakat harus dilakukan (Kautish et al., 2020). Nilai-nilai kemasyarakatan tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian 17 tujuan SDGs, diantaranya yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

II.2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Gerakan pembangunannya didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat yang harus terus ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama (Lumantow, dkk 2017). Menurut Conyers

(Lumantow, dkk 2017), terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu: pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal; kedua, masyarakat akan mempercayai proyek atau pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut; ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Transformasi pembangunan desa yang berdasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa serta pergeseran paradigma. Nampaknya masyarakat bukan lagi menjadi objek pembangunan, tetapi sekaligus juga menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Potensi sumber daya yang dimiliki desa dan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat desa dua hal dasar yang diperlukan dalam upaya pembangunan desa. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai subjek pembangunan dapat mengelola sumber daya desa yang potensial sehingga menjadi sumber pemasukan ekonomi baru bagi desa dan masyarakat desa. Pendapatan tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan keluarga masyarakat desa itu sendiri. Konsep dari dan untuk desa. (Rosaliza, 2016) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa modal sosial merupakan kunci utama dalam pembangunan desa selain kelembagaan local dan dinamisasi teknologi dan pendanaan.

II.3. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu membangun kemampuan dan konsep diri (Novian dalam Hanis & Marzaman, 2020). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan perempuan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri yang meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan pengendalian apa yang mereka lakukan (Latipah, 2020).

Melibatkan perempuan dalam pemerintahan melalui lembaga-lembaga pemerintahan seperti PKK minimal 30% untuk dapat berkreasi dan berinovasi akan memaksimalkan pemerintahan (Pontoh dalam Hanis & Marzaman, 2020). PKK merupakan gerakan Nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat. dengan

perempuan sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, serta mandiri. peningkatan kualitas perempuan ini juga melalui program mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan (Moedjanto dalam Hanis & Marzaman, 2020). Menurut *United Nation of Organization* beberapa gagasan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yakni: 1) penanggulangan kemiskinan; 2) keterlibatan semua orang secara adil dalam perekonomian; 3) perbaikan kualitas hidup perempuan dan laki-laki berkenaan dengan akses terhadap barang dan jasa yang esensial serta informasi yang di butuhkan untuk membuat pilihan; 4) penciptaan basis-basis produktif untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan memungkinkan keadaan perekonomian negara berubah; 5) pembagian kerja secara adil dan penciptaan pranata politik yang melindungi dan memungkinkan pelaksanaan hak asasi warga negara (termasuk hak-hak perempuan) dengan menyediakan akses terhadap hak-hak tersebut yang memungkinkan konflik sosial di pecahkan secara damai. Penghargaan terhadap nilai kultural dan aspirasi sebagai konflik sosial.

Pemberdayaan perempuan dibutuhkan agar perempuan dapat maju dan mandiri, missal melalui kegiatan peningkatan keterampilan yang disukai masing-masing perempuan sehingga akan berguna untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Pada era digital ini, upaya-upaya pemberdayaan perempuan harus dikerjakan dengan tantangan yang lebih sulit. Hal ini bukan karena masyarakat perdesaan tidak memiliki alat teknologi seperti televise dan telepon pintar, melainkan karena kemampuan mereka menggunakan alat teknologi dan menyaring informasi yang didapat dariteknologi tersebut yang menjadi tantangan. Kreativitas dan inovasi harus menjadi dasar pemberdayaan dengan media penggunaan teknologi. (Latipah, 2020) dalam hasil penelitian telah membuktikan bahwa pemanfaatan media sosial seperti YouTube yang digunakan dalam proses pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kreatifitas, minat dan motivasi para perempuan dalam berwirausaha. Dalam rangka keberlangsungan pemberdayaan perempuan terutama di desa, pemerintah perlu mendukung ketersediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pelatihan manajemen kepada perempuan sangat diperlukan. Hal ini penting untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya diri perempuan dalam memulai usaha mandirinya.

BAB III MATERI DAN METODE

III.1. Realisasi Pemecahan Masalah

Penguatan kader perempuan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs di Desa Suak dimulai dengan mengidentifikasi beragam permasalahan yang mempengaruhi peran kader perempuan oleh tim pelaksana pengabdian. Langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan pelatihan dengan melibatkan perempuan Desa Suak. Agenda kegiatan pelatihan adalah mengajak perempuan Desa Suak memetakan aset dan sumber daya desa, serta melakukan analisis kondisi desa. Melibatkan perempuan sebagai objek peningkatan peran dalam langkah perencanaan sangat penting, selain untuk mengedukasi perempuan itu sendiri, kegiatan ini juga sangat bermanfaat terhadap kemungkinan tergalinya banyak potensi yang bisa dikelola dengan melibatkan perempuan didalamnya. Kerangka pemecahan masalah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka Pemecahan Masalah Penguatan Kader Perempuan dalam Percepatan SDGs di Desa Suak

Kondisi Saat Ini	Perlakuan	Kondisi yang Diharapkan
Rendahnya keterlibatan kader perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan desa	Meningkatkan keterlibatan kader perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan desa	Meningkatnya keterlibatan kader perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan desa
Kurangnya akses kader perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di Desa Suak	Meningkatkan akses kader perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di Desa Suak	Meningkatnya akses kader perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di Desa Suak
Rendahnya kapasitas dan peran kader perempuan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk percepatan pencapaian SDGs desa	Meningkatkan kapasitas dan peran kader perempuan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk percepatan pencapaian SDGs desa	Meningkatnya kapasitas dan peran kader perempuan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk percepatan pencapaian SDGs desa

Sumber : diolah tim, 2021

Realisasi pemecahan masalah membutuhkan waktu dan proses sejak pengurusan ijin dan permohonan kerjasama sampai dengan pelaporan kegiatan. Bagian paling penting adalah memahami kondisi masyarakat beserta dengan permasalahan yang melingkupi, kemudian menentukan kebutuhan dan strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan peran perempuan dalam percepatan pencapaian SDGs desa.

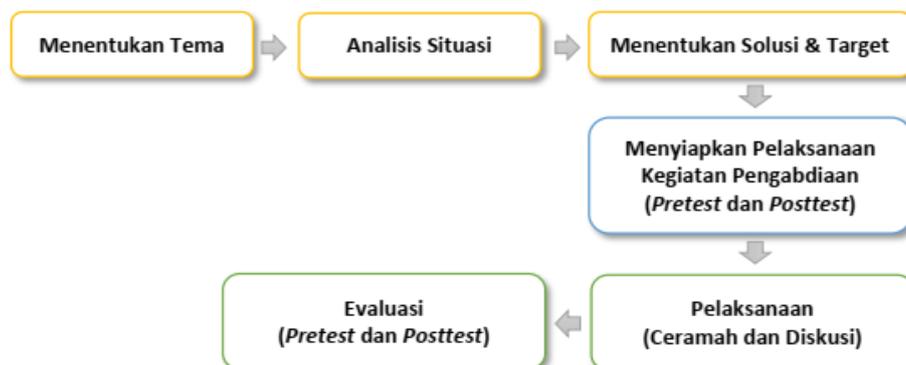
III.2. Sasaran

Sasaran utama dalam kegiatan pelatihan ini adalah mereka yang juga dilibatkan dalam kegiatan, yaitu perempuan dan kader perempuan Desa Suak. Pelibatan perempuan Desa Suak dalam kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya peranan mereka dalam urusan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Aparatur Desa Suak juga dilibatkan dalam kegiatan pelatihan ini. Sebagai pemerintah desa yang bertugas bukan hanya mengurus administrasi pemerintahan desa, pelibatan aparatur desa sangat membantu dalam proses pemetaan pelibatan peran perempuan dalam setiap kegiatan desa. Aparatur desa merupakan salah-satu unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa dan penggerak pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa (Mahayana 2013). Perangkat desa juga menjadi unit terdepan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat (Chintary and Lestari 2016). Dukungan perangkat desa menjadi hal penting untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Suak juga dilibatkan dalam kegiatan pelatihan ini. Program-program PKK yang banyak berorientasi kepada perempuan telah banyak memberikan manfaat dalam pemberdayaan perempuan khususnya di desa. Selain ketiga sasaran tersebut, masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan pendampingan ini dengan tujuan agar masyarakat memahami pentingnya melibatkan perempuan dalam urusan pembangunan desa. Perempuan bukan hanya mahir mengurus rumah tangga, tetapi juga punya kompetensi yang harus ditunjukkan dan dikembangkan melalui peranannya dalam pembangunan desa.

III.3. Metode Kegiatan

Secara ringkas, metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Metode dan Tahapan Kegiatan

Metode dalam kegiatan pelatihan ini adalah ceramah dan diskusi. Tim pengabdian memberikan materi kepada peserta pelatihan kemudian dilanjutkan tanya jawab dengan peserta pelatihan. Pretest dan posttest dilakukan sebelum dan sesudah sesi ceramah dan Tanya jawab berlangsung, hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kesadaran peserta pelatihan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Setelah kegiatan pelatihan selesai, pendampingan masih terus dilakukan melalui komunikasi seluler dan kunjungan langsung ke Desa Suak oleh tim pengabdian.

III.4. Keterkaitan

Pihak-pihak yang terkait dengan penguatan kader perempuan dalam percepatan pencapaian SDGs di Desa Suak adalah mereka yang dilibatkan dalam kegiatan pelatihan. Semua dari mereka yang terlibat penting untuk mengetahui dan memahami pentingnya peran kader perempuan dalam pembangunan desa. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah Kader perempuan Desa Suak Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Mitra akan berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang permasalahan perempuan desa dalam pembangunan desa.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal kegiatan yang telah disusun sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Penguatan Kader Perempuan dalam Percepatan Pencapaian SDGs di Desa Suak

No	Jenis Kegiatan	Bulan						Tempat Kegiatan
		1	2	3	4	5	6	
1	Pembuatan Proposal							Unila
2	Pembuatan Konsep Kegiatan							Unila
3	Pelaksanaan Kegiatan							Bandar Lampung
4	Pembentukan Komunitas							Bandar Lampung
5	Monitoring Komunitas							Bandar Lampung
6	Evaluasi Komunitas							Bandar Lampung
7	Pembuatan Pelaporan							Unila
8	Submit Jurnal							Unila
9	Seminar Nasional Pengabdian							Universitas Brawijaya

Tabel 3. Susunan Acara Penguatan Kader Perempuan dalam Percepatan Pencapaian SDGs Desa Suak

No	Hari	Waktu	Materi	Metode	Pemateri	
1.	Hari Pertama	08.30 – 09.00	Pembukaan	-	Tim FISIP Unila	
		09.00 – 09.30	Pre-Test	-	Tim FISIP Unila	
		09.30 – 11.30	SDGs Desa	Ceramah & Diskusi	Selvi Diana Meilinda, MPA.	
		11.30 – 12.30	ISHOMA			
		12.30 – 15.00	Pembangunan desa	Ceramah & Diskusi	Syamsul Ma'arif	
3.	Hari Kedua	09.00 – 11.00	Peran kader perempuan	Ceramah, Diskusi	Ita prihantika	
		11.00 – 12.00	Praktek		Anisa Utami	
		12.00 – 13.00	ISHOMA			
		13.00 – 13.30	Identifikasi peran	Ceramah, Diskusi	Ita prihantika	
		13.30 – 15.00	Praktek		Selvi Diana Meilinda	
		15.00 – 15.30	Penutupan		Tim	
4	Hari Ketiga s/d akhir bulan kedua	-	Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi)	Komunikasi via WA & telpon serta kunjungan	Tim	

IV.2. Hasil Pengolahan Data Pengabdian

Istilah pembangunan berkelanjutan mulai digunakan tahun 1960 dengan fokus pada pelestarian alam yang didasari oleh teori ekologi. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan dan aspirasi mereka (Masron et al., 2018). Pendapat tersebut kemudian dikembangkan oleh para ahli perihal keterkaitannya dengan kondisi yang akan datang dalam masa yang lebih panjang, perencanaan besar jangka panjang. Sejumlah 17 tujuan dan 169 target pembangunan berkelanjutan kemudian telah dirumuskan sebagai inti dari “pembangunan berkelanjutan” (Estoque, 2020). Ke-17 tujuan tersebut adalah keadaan-keadaan yang harus dicapai untuk dapat berada dalam kondisi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam mencapai ke-17 tujuan tersebut, diperlukan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur ketercapainnya. Identifikasi indikator-indikator ini dilakukan oleh Bppenas, BPS dan hasil penelitian ilmiah (Setianingtyas et al., 2019). 17 tujuan SDGs tersebut yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

SDGs menjadi tujuan pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan SDGs, sinergi kebijakan perencanaan telah disusun dari level pemerintah pusat hingga ke pemerintah kabupaten/ kota. Mulanya, kebijakan perencanaan yang selaras dengan SDGs belum mampu menyentuh level desa, hingga kemudian adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah merubah paradigma pembangunan desa. Sumber daya desa yang melimpah dan kewenangan mengelola terhadap pemerintah dan masyarakat desa, tren mewujudkan SDGs dari desa bukan hanya narasi saja. Desa memang mampu menjadi awal keberhasilan pencapaian SDGs nasional. Pentingnya SDGs bukan sekedar karena SDGs sesuai dengan kebijakan pembangunan desa, tapi juga karena SDGs butuh diimplementasikan ke desa sehingga peluang keberhasilan pencapaian SDGs desa menjadi maksimal (Andari, 2021)

Pembangunan desa mengamanatkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah desa tidak bekerja sendiri dalam menjalankan pemerintahan desa.

Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi harus melibatkan masyarakat desa yang majemuk. Dalam proses-proses keberlangsungan pemerintahan desa, bagian yang masih banyak dikesampingkan adalah peran perempuan. Pembiasaan berulang tahun ke tahun oleh orang-orang terdahulu tentang perempuan harus pandai mengurus rumah tangga rupanya telah menjadi paradigma baru yang mengkerdikan potensi yang dimiliki pribadi perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa kemudian dianggap bukan sesuatu yang biasa. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan banyak kepedulian baik dari lembaga publik atau privat untuk membangun dan terus meningkatkan peran perempuan agar dapat hadir dan berkontribusi dalam pembangunan desa.

Pengabdian ini salah satu dari kepedulian lembaga perguruan tinggi terhadap urgensi kehadiran perempuan dalam pembangunan. Keith Davis (Agnes et al., 2016) mendefinisikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai keterlibatan mental dan emosi masyarakat desa yang mendorong mereka untuk berpartisipasi pada tujuan-tujuan desa dan bertanggungjawab terhadapnya. Sebelum memberikan pelatihan dan pendampingan lanjutan, telah dikumpulkan beberapa permasalahan yang dialami di Desa Suak berkaitan dengan peran perempuan dalam pembangunan. Permasalahan-permasalahan itu diantaranya adalah rendahnya keterlibatan kader perempuan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan desa, kurangnya akses kader perempuan untuk serta dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di Desa Suak, dan rendahnya kapasitas dan peran kader perempuan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk percepatan pencapaian SDGs desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian menjadi dasar penentuan materi dan strategi penguatan kader perempuan dalam percepatan pencapaian SDGs Desa Suak. Dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari tersebut, peserta pelatihan diberikan banyak pemahaman tentang perempuan dan peranannya dalam pembangunan desa. Kader perempuan sebagai sasaran utama kegiatan ini, meskipun begitu materi yang diberikan bukan hanya ditujukan kepada kader perempuan. Materi manajemen seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dapat dimanfaatkan oleh semua peserta yang hadir. Hal ini karena pada dasarnya kompetensi manajemen tidak hanya bermanfaat bagi urusan pemerintahan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bagi perempuan, kompetensi ini sangat penting untuk dapat memajemen kegiatan rumah tangganya dan keterlibatan dirinya dalam pembangunan desa. Pentingnya dukungan dan pemahaman dari aparat desa dan masyarakat desa juga

menjadi salah satu materi yang disampaikan dan diharapkan dapat terus diterapkan dalam pemerintahan Desa Suak.

Bagian yang tidak kalah penting dalam kegiatan ini adalah materi tentang pentingnya menyadari dan menggali potensi sumber daya desa yang dapat dijadikan sumber pemasukan bagi masyarakat dan Desa Suak. Potensi sumber daya tidak selalu berupa hasil kebun, sawah, atau peternakan. Banyak potensi lain seperti pariwisata dan aktivitas ekonomi produktif. Potensi-potensi tersebut kemudian dapat dikelola menjadi beberapa tipe usaha seperti *servicing* (pelayanan), *banking* (simpan pinjam), *renting* (penyewaan), dan *brokering* (perantara) (Elsi et al., 2020). Dalam kegiatan ini banyak masyarakat yang baru menyadari betapa luas yang disebut sumber daya itu. Tim pengabdian kemudian juga mengajak peserta pelatihan untuk sadar dan peduli terhadap budaya masyarakat Desa Suak. Penjagaan, pengelolaan dan pelestarian budaya juga dapat menjadi nilai tambah dalam upaya mewujudkan SDGs di Desa Suak. Budaya berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semakin sering masyarakat mengimplementasikan budaya maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan mengalami peningkatan (Lumantow, dkk 2017).

Perbedaan pengetahuan tentang pentingnya peran kader perempuan dalam pembangunan Desa Suak terlihat dari hasil pretest dan posttest yang dilakukan peserta pelatihan. Ada peningkatan pengetahuan dan kesadaran dari rata-rata peserta pelatihan, terutama kader perempuan. Kader perempuan menjadi percaya diri dan semangat untuk bangkit dan berperan aktif dalam pembangunan Desa Suak. Pemerintah desa setuju dan mendukung penguatan peran kader perempuan dalam percepatan pencapaian SDGs di Desa Suak, sementara PKK siap memberi panggung dan bersama-sama menguatkan peran perempuan. Dan masyarakat harus terus didampingi agar paradigma lama tentang perempuan tidak lagi mematikan potensi perempuan diluar urusan rumah tangga.

Setelah pelatihan yang dilakukan selama tiga hari, kegiatan penguatan kader perempuan dalam pembangunan di Desa Suak masih terus dilanjutkan melalui pendampingan. Pendampingan difokuskan pada perkembangan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah Desa Suak terkait dengan keterlibatan perempuan dalam setiap lini kehidupan masyarakat desa. Selain itu, pendampingan juga bertujuan untuk menjawab setiap kebutuhan perempuan dan pemerintah desa dalam praktik awal pelibatan perempuan.

Hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pengabdian terhadap kader perempuan Desa Suak ini adalah terjadi peningkatan keterlibatan kader perempuan

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan Desa Suak. Hal ini tidak lepas dari perubahan arah kebijakan pemerintah desa, penerimaan masyarakat desa, serta kemauan dan kemampuan kader perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kesimpulan kegiatan pengabdian ini sesuai dengan hasil penelitian (Agnes et al., 2016). Akses kader perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di Desa Suak juga meningkat. Berdasarkan hasil pendampingan, kader perempuan sudah dilibatkan pemetaan dan penentuan sumber daya ekonomi Desa Suak yang akan dikelola sehingga menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat Desa Suak. Selain itu, kapasitas dan peran kader perempuan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk percepatan pencapaian SDGs Desa Suak juga meningkat. Kapasitas kader perempuan meningkat seiring dengan seringnya kader perempuan dilibatkan dalam setiap kegiatan pemerintahan Desa Suak, banyak nya kegiatan yang dilakukan kader perempuan telah mengasah sensitivitas dan kreativitas untuk terus mengembangkan potensi Desa Suak.

IV.3. Pembahasan

Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan kader perempuan dalam percepatan pencapaian SDGs di Desa Suak Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan-tujuan ini yang diharapkan mampu dipahami dan dipertahankan atau lebih baik dikembangkan oleh pemerintah Desa Suak, masyarakat Desa Suak dan kader perempuan sebagai sasaran utama kegiatan ini. Setelah adanya kegiatan penguatan ini diharapkan tidak ada lagi pemerintahan Desa Suak yang berjalan apa adanya tanpa ada keterlibatan perempuan, sehingga Desa Suak dapat melakukan akselerasi pembangunan. Urgensi pengarusutamaan SDGs Desa dalam pembangunan adalah untuk memperkuat posisi Desa sebagai poros utama mewujudkan SDGs (Andari, 2021).

Kegiatan penguatan kader perempuan ini juga menyadarkan aparatur Desa Suak bahwa kader perempuan berperan penting dalam pembangunan Desa Suak. Kehadiran perempuan ditengah urusan pembangunan Desa Suak harus didukung oleh pemerintah Desa Suak melalui arah kebijakan yang menunjukkan keberadaan perempuan; pelibatan perempuan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemerintahan Desa Suak; serta memberdayakan perempuan dalam pengelolaan sumber daya desa yang potensial. Sikap pemerintah Desa Suok ini akan menggeser paradigm masyarakat desa yang sebelumnya belum menganggap penting peran kader perempuan dalam pembangunan Desa Suak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dalam kegiatan penguatan kader perempuan dalam percepatan pencapaian SDGs di Desa Suak dan pendampingan selama beberapa waktu, dapat diketahui bahwa kader perempuan di Desa Suak masih belum optimal perannya dalam kegiatan pembangunan desa. Kegiatan penguatan yang dilakukan oleh tim pengabdian ini merupakan langkah tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Suak. Hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pengabdian terhadap kader perempuan Desa Suak ini adalah terjadi peningkatan keterlibatan kader perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan Desa Suak. Hal ini tidak lepas dari perubahan arah kebijakan pemerintah desa, penerimaan masyarakat desa, serta kemauan dan kemampuan kader perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kesimpulan kegiatan pengabdian ini sesuai dengan hasil penelitian (Agnes et al., 2016). Akses kader perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di Desa Suak juga meningkat. Berdasarkan hasil pendampingan, kader perempuan sudah dilibatkan pemetaan dan penentuan sumber daya ekonomi Desa Suak yang akan dikelola sehingga menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat Desa Suak. Selain itu, kapasitas dan peran kader perempuan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk percepatan pencapaian SDGs Desa Suak juga meningkat. Kapasitas kader perempuan meningkat seiring dengan seringnya kader perempuan dilibatkan dalam setiap kegiatan pemerintahan Desa Suak, banyak nya kegiatan yang dilakukan kader perempuan telah mengasah sensitivitas dan kreativitas untuk terus mengembangkan potensi Desa Suak.

V.2. Saran

Kapasitas aparatur desa dan kader perempuan harus selalu ditingkatkan supaya kreativitas dan inovasi dapat terus dilakukan. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah Desa Suak harus peka terhadap kebutuhan pelatihan lanjutan terhadap aparatur desa, kader perempuan dan bahkan juga masyarakat. Pemerintah Desa Suak dapat bekerjasama dengan pemerintah kecamatan atau kabupaten, atau juga dengan perguruan tinggi dan swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. S. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I.
- Chintary, Valentine, and Asih Lestari. 2016. "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)." Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Iping, Baso. 2020. "PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL." JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL.
- Mahayana, Wayan. 2013. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur." EJournal Ilmu Pemerintahan .
- Mufida, A. 2020. "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. ADALAH Buletin Hukum & Keadilan." Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara.
- Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, and Syaiful Ikhsan. 2020. "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia." Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara
- Agnes, P. O., Sartika, D. D., & Yunindyawati. (2016). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Empirika*, 1(2).
- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1).
<https://doi.org/10.31845/jwk.v24i1.713>
- Elsi, S. D., Bafadhal, F., & Ahmad, R. (2020). INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2). <https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.71-76>
- Estoque, R. C. (2020). A review of the sustainability concept and the state of SDG monitoring using remote sensing. In *Remote Sensing* (Vol. 12, Issue 11).
<https://doi.org/10.3390/rs12111770>
- Hanis, N. W., & Marzaman, A. (2020). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2). <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.123-135.2019>
- Kautish, P., Khare, A., & Sharma, R. (2020). Values, sustainability consciousness and intentions for SDG endorsement. *Marketing Intelligence and Planning*, 38(7).

<https://doi.org/10.1108/MIP-09-2019-0490>

Latipah, I. (2020). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMANFAATAN MEDIA YOUTUBE DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN WIRAUSAHA. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(2).

<https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i2.4150>

Masron, T., Rainis, R., & Oetomo, H. o W. (2018). INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE - DEVELOPMENT): SEBUAH PERSPEKTIF RUANGAN. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 8(4).

<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2004.v8.i4.361>

PENGARUH BUDAYA MAPALUS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TOMBASIAN ATAS KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA. (2017). *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046).

Pradhan, P., Costa, L., Rybski, D., Lucht, W., & Kropp, J. P. (2017). A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interactions. *Earth's Future*, 5(11).

<https://doi.org/10.1002/2017EF000632>

Rosaliza, M. (2016). MODAL SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN DESA. *Jurnal Ilmu Budaya*, 13(1). <https://doi.org/10.31849/jib.v13i1.1121>

Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). PEMODELAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(2), 61–74. [https://doi.org/10.14203/jep.27.2.2019.61-](https://doi.org/10.14203/jep.27.2.2019.61-74)

74

LAMPIRAN

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENGABDIAN
DESA SUAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2021**



MATERI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DESA SUAK LAMPUNG SELATAN

PEMBANGUNAN DESA BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)/ TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Oleh
Selvi Diana Mellinda, S.AN., MPA.

1

PRINSIP SDGs



3

LATAR BELAKANG

- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda internasional untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.
- SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 193 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia.
- SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

2

KOMITMEN INDONESIA DALAM PELAKSANAAN TPB/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

adalah pembangunan yang menjaga:

- peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
- kualitas lingkungan hidup;
- pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

Komitmen:

1. **Indonesia berkomitmen** melaksanakan TPB/SDGs untuk **transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan** sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip bebas dan aktif di kancah dunia;
2. Komitmen tersebut diwujudkan dengan **Perpres Nomor 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. **TPB/SDGs sejalan dengan Nawacita** yang diterjemahkan ke dalam **RPJMN 2015-2019** untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong untuk mencapai cita-cita luhur bangsa;
4. Presiden akan terus memantau pelaksanaan TPB/SDGs mengingat bahwa **pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional.**

4

VILLAGE THEN VS VILLAGE NOW FOLLOWING LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE

VILLAGE THEN	VILLAGE NOW
Village as the Object of Development	Village as the Subject of Development
Government-driven development or community-driven development	Village-driven development and participatory



5

RECAPITULATION OF VILLAGE FUND UTILIZATION DURING 2015-2017

MENUNJANG EKONOMI				MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA			
 JALAN DESA 12.178 KM	 JEMBATAN 1.960 KM	 PASAR DESA 3.229 UNIT	 BUMIHOLA 21.610 UNIT	 PERMBAHAN LANTAI 293.387 UNIT	 AIR BERSIH 22.711 UNIT	 MCK 82.358 UNIT	 POLIKES 6.947 UNIT
 TAMBAHAN PERAHU 9.116 UNIT	 EMBELING 7.047 UNIT	 RIGASI 41.773 UNIT	 SARANA OLARAGRA 2.388 UNIT	 DRAINASE 950.371 UNIT	 PINDA 21.897 UNIT	 POSTYANDU 13.973 UNIT	 SUMBER 43.848 UNIT

*) Data Per 6 March 2018

7

VILLAGE FUND DISTRIBUTION IN 2015 - 2018

Year	Total Village Fund (Rp)	Number of Villages	Absorption Rate (%)
2015	± Rp 283,3 ml/Village Rp 20,87 T	74.093 VILLAGES	82,72%
2016	± Rp 643,6 ml/Village Rp 46,98 T	74.754 VILLAGES	97,65%
2017	± Rp 800,4 ml/Village Rp 60 T	74.919 VILLAGES	98,26%*
2018	± Rp 800,4 ml/Village Rp 60 T	74.959* VILLAGES	98,26%



*) Data from Spreads Apps System
diakses April 2018 (www.desa.go.id)
per January 21, 2018
*) Ministry of Finance

6

CHANGE OF VILLAGE FUND ALLOCATION FORMULA IN 2018

2015-2017

- 90%: Basic Allocation (Equity)
- 10% by variable:
 - a) Number of Villagers (25%)
 - b) Village Poverty Rate (35%)
 - c) Village Area (10%)
 - d) Village Geographical Difficulty (30%).

2018

- 77%: Basic Allocation (Equity)
- 3%: Affirmative allocation (Disadvantaged and extremely disadvantaged villages with high poverty)
- 20% by variable:
 - a) Number of Villagers (10%)
 - b) Village Poverty Rate (50%)
 - c) Village Area (15%)
 - d) Village Geographical Difficulty (25%)

8

ALLOCATION OF VILLAGE FUND UTILIZATION

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

Pemenuhan kebutuhan dasar

Pembangunan sarana dan prasarana Desa

Pengembangan potensi ekonomi lokal

Pemertanian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

TUJUAN : meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Program pembangunan diarahkan kepada:

- Lingkungan pemukiman,
- Transportasi,
- Energi,
- Informasi dan Komunikasi,
- Kesehatan Masyarakat Desa,
- Pendidikan dan Kebudayaan,
- Ketahanan Pangan,
- Produk Unggulan,
- Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
- penanganan bencana alam; dan
- pelestarian lingkungan hidup.

PRIORITY OF VILLAGE FUND UTILIZATION

Permendes No 19 Tahun 2017

- Bidang Pembangunan Desa
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Lintas Bidang

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TUJUAN : meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat desa

Program pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada:

- peningkatan kualitas layanan sosial dasar
- Manajemen sumberdaya lokal
- Ekonomi yang produktif,
- Peningkatan manajemen usaha
- peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana,
- konservasi lingkungan, dan
- penguatan pemerintahan desa yang demokratis

LINTAS BIDANG

TUJUAN: membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat *lintas bidang*

Program lintas bidang diarahkan kepada:

- Produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan,
- BUM Desa atau BUM Desa Bersama,
- Embung Desa, dan
- Sarana Olahraga Desa

13

TUJUAN DAN INDIKATOR PRIORITAS DI TINGKAT DESA

- Tiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tujuan, sasaran, dan indikatornya kemungkinan juga berbeda.
- Namun, permasalahan yang umum dijumpai adalah kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan.
- Karena itu, tiap desa umumnya juga memprioritaskan tujuannya sebagai berikut:
 1. Tujuan 1: Meniadakan kemiskinan di desa
 2. Tujuan 2: Memperkokoh ketahanan pangan desa
 3. Tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahteraan di desa
 4. Tujuan 4: Pendidikan berkualitas di desa

15

PEMBANGUNAN DESA BERBASIS TPB/SDGs

- TPB/SDGs Indonesia adalah kesepakatan nasional dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan, merupakan rangkuman pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan, di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan di tingkat desa
- Dengan demikian, sudah selayaknya Pembangunan Desa diarahkan pada pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan
- Dana Desa seharusnya diarahkan untuk bisa mendanai pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat desa
- Pembangunan desa berbasis TPB/SDGs merupakan skenario pembangunan desa yang penyusunan program dan kegiatannya diarahkan untuk pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa

14

HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PRIORITAS DI TINGKAT DESA

- Setiap desa seharusnya memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- Agar dana desa dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai sasaran, maka setiap tahapan RPJM-Des maupun RKP-Des memerlukan Rencana Aksi Daerah (RADes).
- Agar program pembangunan desa dapat disinergikan dengan TPB/SDGs, maka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RADes) perlu didasarkan atas indikator-indikator aktual sesuai tujuan prioritas.
- Agar indikator-indikator aktual dapat ditetapkan, maka data dasar (*baseline*) yang mengindikasikan kondisi aktual harus tersedia.
- Data dasar tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai indikator acuan yang mengukur ketercapaian sasaran pembangunan yang dilaksanakan.

16



Pertanyaan Indikator:

1. Berapa banyak rumah tangga miskin? Total penduduk miskin?
2. Berapa banyak penduduk miskin yang mengikuti BPJS?
3. Apakah ada penduduk miskin penyandang difabilitas di desa ini? Apakah sudah mendapatkan bantuan?
4. Berapa jumlah penduduk miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai?
5. Berapa jumlah rumah miskin yang persalinannya di fasilitas pelayanan kesehatan?
6. Berapa persen cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan?
7. Berapa banyak penduduk perempuan miskin yang memakai alat kontrasepsi?
8. Berapa banyak rumah tangga miskin yang mampu mengakses air minum layak?
9. Berapa banyak rumah tangga miskin yang mampu mengakses sanitasi layak?
10. Berapa banyak rumah tangga miskin yang mampu memiliki hunian layak?
11. Berapa jumlah anak usia SD? Berapa banyak anak usia SD tersebut yang tidak sekolah?
12. Berapa jumlah anak usia SMP? Berapa banyak anak usia SMP tersebut yang tidak sekolah?
13. Berapa jumlah anak usia SMA? Berapa banyak anak usia SMA tersebut yang tidak sekolah?
14. Berapa banyak penduduk yang belum mempunyai akte kelahiran?
15. Berapa banyak rumah tangga miskin yang mampu mengakses penerangan listrik?

17



Pertanyaan Indikator:

1. Berapa banyak kasus kematian ibu melahirkan di desa ini pada tahun 2017?
2. Berapa banyak ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan?
3. Berapa banyak persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan trampil tahun 2017?
4. Berapa banyak kasus kematian bayi lahir hidup di desa ini pada tahun 2017?
5. Apakah ada penderita HIV di desa ini? Jika ada, berapa banyak?
6. Apakah ada penderita TBC di desa ini? Jika ada, berapa banyak?
7. Apakah ada penderita Malaria di desa ini? Jika ada, berapa banyak?
8. Apakah ada penderita Kusta di desa ini? Jika ada, berapa banyak?
9. Apakah ada penderita Filariasis/kaki gajah di desa ini? Jika ada, berapa banyak?
10. Berapa banyak anak di bawah usia 18 tahun yang merokok?
11. Berapa banyak penduduk yang mengalami prevalensi tekanan darah tinggi?
12. Berapa banyak penduduk usia 18 tahun ke atas yang mengalami prevalensi obesitas?
13. Berapa banyak penduduk yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas?
14. Berapa jumlah kelahiran pada tahun 2017?
15. Berapa jumlah remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan?
16. Berapa banyak penduduk yang menerima Jaminan Kesehatan Nasional?

19



Pertanyaan Indikator:

1. Berapa banyak anak balita di desa ini yang mengalami prevalensi kekurangan gizi?
2. Berapa banyak penduduk di desa ini yang mengalami kekurangan asupan kalori?
3. Berapa banyak anak balita di desa ini yang mengalami prevalensi stunting (sangat pendek)?
4. Berapa banyak anak balita di desa ini yang mengalami prevalensi wasting (sangat kurus)?
5. Berapa banyak ibu hamil di desa ini yang mengalami prevalensi anemia?
6. Berapa banyak bayi di bawah 6 bulan di desa ini yang mendapat ASI eksklusif?
7. Berapa rata-rata pendapatan petani kecil di desa ini?

18



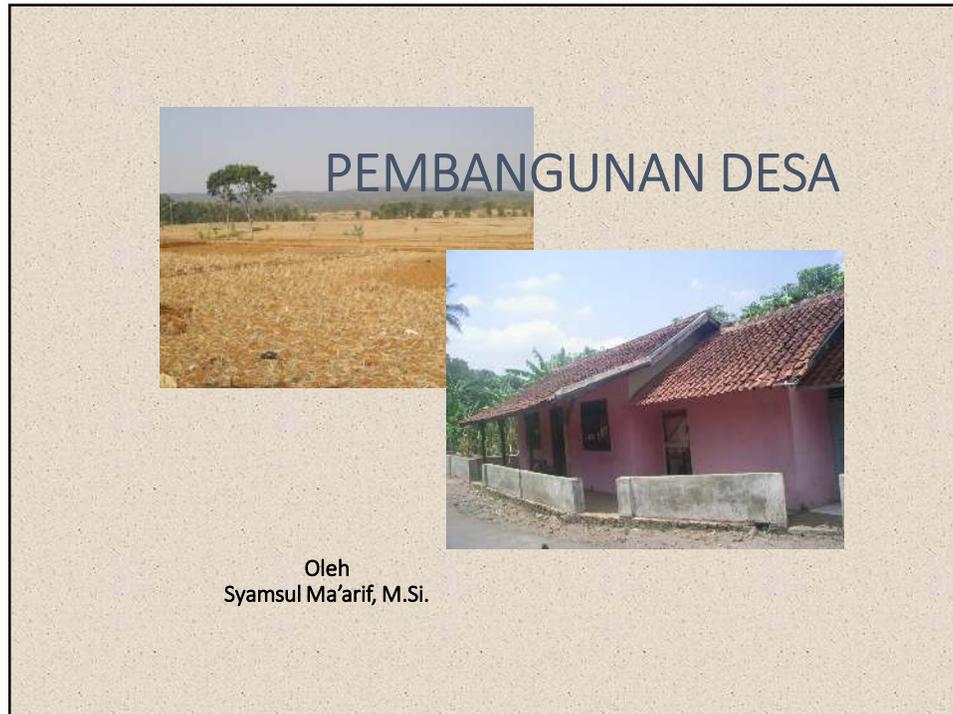
Pertanyaan Indikator:

1. Apakah di desa ini ada SD? Jika ada, apa nilai akreditasi SD tersebut?
2. Apakah di desa ini ada SMP? Jika ada, apa nilai akreditasi SMP tersebut?
3. Apakah di desa ini ada SMA? Jika ada, apa nilai akreditasi SMA tersebut?
4. Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di desa ini?
5. Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts di desa ini?
6. Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA di desa ini?
7. Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di desa ini?
8. Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di desa ini?
9. Berapa Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI laki-laki/perempuan di desa ini?
10. Berapa Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts laki-laki/perempuan di desa ini?
11. Berapa Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA laki-laki/perempuan di desa ini?
12. Berapa Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi laki-laki/perempuan di desa ini?
13. Apakah ada penduduk usia 15-59 tahun yang buta huruf?

Catatan:

Angka Partisipasi Murni (APM): Proporsi penduduk pada kelompok umur/ jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK): Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.



Pengertian Pembangunan Desa

- Menurut Dirjen Bangdes, pembangunan desa adalah metoda untuk menyelenggarakan usaha-usaha yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh penduduk secara langsung, umum, relatif merata, dan meningkat, yang didalam proses tersebut masyarakat setempat berkedudukan sebagai subjek pembangunan, dan pemerintah memberikan pengarahannya, dorongan, koordinasi, pengendalian dan penggairahannya.
- Menurut buku "Pembahasan UU No.5 Tahun 1979", pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan serta berlangsung di desa.
- Desa menurut UU No. 22 Tahun 1999, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul-usul yang bersifat istimewa.

Strategi Pembangunan Desa Dalam Jangka Panjang

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi. Strategi pembangunan desa dalam jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan desa dwakarya dengan memperhatikan :

1. Keserasian antara pedesaan dan perkotaan
2. Imbangan kewajiban pemerintah dan masyarakat
3. Keterpaduan yang harmonis antara berbagai program sektoral / regional / Inpres dan partisipasi masyarakat.

Untuk mempercepat pembangunan desa maka dibentuk Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) pada tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh camat, dan UDKP ini merupakan Tim Koordinasi Sektoral (TKS).

Arah Pembangunan Desa

1. Tercapainya landasan kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri.
2. Terbinanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
3. Mampu menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat
4. Dapat menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat
5. Dapat mengatur dan mengendalikan penyebaran dan pertumbuhan penduduk

Bidang Pembangunan Desa

1. Pembangunan Bidang Ekonomi
 - a. Pertanian
 - b. Industri (non pertanian)
2. Pembangunan Bidang Sosial
 - a. kependudukan : pertumbuhan dan penyebaran
 - b. Kuantitas dan kualitas (imtaq dan lptek)
3. Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
 - a. fisik alami
 - b. fisik buatan (prasarana dan sarana)
4. Bidang Pemerintahan

Kelembagaan Desa (dalam desa swadaya, dst)

1. Rempug desa
2. Bumdes
3. Rukun Tetangga, Rukun Kampung
4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Perhimpunan Pemakai Air (Mitra Cai)
6. Majelis Ulama dan Lembaga-lembaga keagamaan lainnya
7. Perkumpulan kematian
8. Perhimpunan Kerukunan Tani Indonesia
9. Lembaga Sosial Kampung (LSK)

Prioritas Pembangunan Daerah Saat ini

1. Perluasan kesempatan kerja di sector non pertanian di pedesaan
2. Peningkatan kemampuan professional aparat pelaksana dan pengarah
3. Pengembangan koperasi di pedesaan

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

OLEH: ITA PRIHANTIKA, MA.

Disampaikan pada Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
Di Desa Suak Lampung Selatan

APA PENTINGNYA DESA ?

- Desa, secara sosiologis maupun politis memiliki posisi yang sangat kuat. Dengan jumlah sekitar 74.957 desa dan sekitar 8.490 kelurahan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di desa.
- Dengan demikian, posisi pemerintah desapun memiliki arti strategis, karena posisinya yang paling dekat dengan masyarakat

**BAGAIMANA NEGARA MEMPOSISIKAN
DESA ?**

- Negara memposisikan desa secara mendua, di satu sisi mengakui desa sebagai bentuk otonomi asli yang memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya di sisi lain diperlakukan sebagai bagian/ struktur terbawah penyelenggaraan pemerintahan di bawah kabupaten (bagian dari kebijakan desentralisasi)

3
Kushandajani 19

Desa yang memiliki otonomi asli



4
Kushandajani 19

Otonomi desa bisa dilihat dari beberapa indikator:
(Kushandajani & Puji Astuti, 2017)

Pertama dari cara memilih pemimpinnya dimana kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa.

Kedua, desa bisa mengambil keputusan atas nama sendiri dalam bentuk peraturan desa.

Ketiga, Otonomi desa juga bisa dilihat dari hak pemerintah desa menyusun dan melaksanakan anggaran sendiri yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Keempat, Desa memiliki organ pemerintah desa yang otonom.

Kelima dari aspek kewenangan, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa,

Kushandajani 19

5

Desa sbg struktur terbawah

- Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014:

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kushandajani 19

6

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan konsep yang terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan dari fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Justru fungsi terakhir, **pemberdayaan masyarakat desa**, yang menjiwai fungsi-fungsi lainnya, melalui nilai lokal yang disebut gotong royong.

KUSHANDAJANI 19

7

PERNA PEREMPUAN



Kushandajani 19

8

- Pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya juga tercakup di dalam UU No. 6 tahun 2014, khususnya dalam pasal 26 ayat (4) yang menjelaskan salah satu kewajiban kepala desa adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya dalam pasal 63 disebutkan tentang kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang salah satunya adalah melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Kushandajani 19

9

- Secara lebih eksplisit pasal 58 menyebutkan bahwa keanggotaan BPD didasarkan pada wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 tentang desa pasal 121 ayat (2) menyebutkan secara jelas tentang kegiatan pembangunan desa yang harus ditetapkan berdasarkan keadilan gender, pasal 72 ayat (1) yang menyebutkan pengisian keanggotaan BPD dengan menjamin keterwakilan perempuan, serta pasal 80 ayat (3) yang menyebutkan perwakilan kelompok perempuan merupakan salah satu unsur masyarakat yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tertinggi di desa, yaitu musyawarah desa.

Kushandajani 19

10

PEMBERDAYAAN BIDANG POLITIK

- Pemberdayaan bidang politik mengacu pada wadah-wadah sebagaimana yang disebut dalam UU No. 6 Tahun 2014 dimana pengambilan keputusan dapat diambil dalam berbagai wadah seperti struktur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes).



11

- Di ranah pemberdayaan politik perempuan, keikutsertaan perempuan dalam pemerintahan desa memang secara kuantitatif perempuan tidak banyak yang ambil bagian dalam proses dalam pengambilan keputusan desa. Kehadiran perempuan dalam proses tersebut rendah, apalagi dalam tataran mendiskusikan alternatif keputusan yang akan diambil. Kepala desa tetap mendominasi pembuatan keputusan di desa. Bagaimanapun isu gender tetaplah ditempatkan sebagai hal sekunder diantara prioritas pembangunan desa.

Kushandajani 19

12

PEMBERDAYAAN BIDANG SOSIAL

- Wadah bagi pemberdayaan bidang sosial perempuan cukup banyak, seperti PKK, Dasa Wisma, kesehatan, pendidikan.



13

- Di ranah pemberdayaan sosial perempuan menunjukkan ruang yang lebih terbuka bagi keterlibatan perempuan. Di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan sampai pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan di desa, peran perempuan sangat kuat. Alasan klasik sering diutarakan seperti perempuan lebih rajin, tertib, sabar dalam menangani persoalan sosial dibanding laki-laki, meski dalam kenyataannya para perempuan aktivis sosial di dua desa cenderung lebih kuat memiliki komitmen dalam melaksanakan aktivitas sosial mereka.

Kushandajani 19

14

PEMBERDAYAAN BIDANG EKONOMI

- Adapun wadah pemberdayaan ekonomi perempuan ada pada UMKM (terasuk industri rumah tangga) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).



Kushandajani 19

15

- Di ranah pemberdayaan ekonomi perempuan desa menunjukkan keterlibatan perempuan yang sangat tinggi. Keterlibatan tersebut terwadahi melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) dan BUMDesa. Penghasilan tambahan yang diperoleh melalui KWT dan BUMDesa secara langsung memberikan dampak pada peningkatan ekonomi keluarga

Kushandajani 19

16

Dilihat dari temuan di atas, pemberdayaan politik perempuan lemah dibandingkan sosial dan ekonomi. Mengapa? Karena konstruksi masyarakat desa bersangkutan belum menempatkan posisi perempuan sebagai mitra dalam pengambilan keputusan. Hal ini mempengaruhi kaum perempuan di desa untuk membatasi kiprahnya dalam proses-proses pengambilan keputusan karena keberadaan mereka sudah terwakili oleh para suami yang juga hadir dalam proses-proses pengambilan keputusan di desa. Meski ada beberapa perempuan yang sudah menduduki posisi sebagai perangkat desa, bahkan di posisi strategis sebagai sekretaris desa, namun kiprahnya masih sebatas mengeksekusi keputusan yang sudah diambil kepala desa melalui forum musyawarah desa. Tidak sekalipun ikut terlibat dalam penyusunan konsep apalagi andil dalam memutuskan kebijakan tingkat desa. Sebaliknya di ranah sosial dan ekonomi desa perempuan begitu dominan, karena para suami memang membuka ruang luas di dua bidang tersebut. Saat para suami pergi bekerja di luar rumah, maka perempuan aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi desa.

Kusandajani 19 17

HAKEKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui **penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.**

Kusandajani 19 18



- Menyimak substansi otonomi desa, pemberdayaan masyarakat, posisi dan peran provinsi bagi desa, maka program menyangkut **“penguatan pemberdayaan masyarakat desa”** melalui:
 1. Kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dengan titik berat pada fasilitasi dan koordinasi
 2. Bantuan keuangan bagi program pemberdayaan masyarakat desa (replikasi program dari pusat atau program baru dari APBD Prov ?)
 3. Penguatan kelembagaan (pemerintah desa maupun sosial)

Kusbandajani 19 21

